2023

1

LAPORAN
KINERJA

BADAN KESATUAN BANGS
DAN POLITIK PROVINSI K
BANGKA BEITUNG

KataPengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2023 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LkjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan dimasa mendatang.

Pangkalpinang, Januari 2024

Plt. KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG,

KURNIAWAN, S.T., M.T.
19731006 200003 1 002

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis " Penguatan Kehidupan yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila "
   - Diukur dengan indikator Kinerja " Persentase Peristiwa Konflik Sosial Menurun Setiap Tahunnya " dengan Formulasi Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Kasus Pada Tahun N}}{\text{Jumlah Kasus}} \text{ X } 100\%$$

   - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 5 (lima) Program, yakni Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, Program Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Politik dan Budaya serta Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik.;
   - Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 75%; sampai dengan bulan Desember 2023 terealisasi 74,29%. Dengan demikian capaian ini sesuai dengan target. Prosentase realisasi terhadap target mencapai 100%;

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa **tantangan** yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke depan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Ketentraman dan Ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat;
2. Meningkatkan kesadaran partisipasi pemilih;
3. Meningkatkan kualitas lembaga demokrasi.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d2021 terhadap target 2022(%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Peristiwa Konflik Sosial Menurun Setiap Tahun	87,18%	75%	74,29%	100	25%	100
2.	Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	90	66	-	100	72	100

DaftarIsi

KATA PENGANTAR 2
IKHTISAR EKSEKUTIF 3
DAFTAR ISI 5
DAFTAR TABEL 6
DAFTAR GAMBAR 7
BAB I PENDAHULUAN 8
1.1 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 11
1.2 Tugas, Fungsi, dan Peta jabatan Organisasi 11-14
1.3 Isu-isu Strategis 17
1.4 Dukungan SDM, Sarana - Prasarana dan Anggaran 17
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2021 22
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 25
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD 25
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan 27
2.3 Struktur Program dan kegiatan 2022 27
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 30
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja 30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 32
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022 32
3.2. Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2022 33
3.3. Realisasi Anggaran 43
BAB IV PENUTUP 50
LAMPIRAN-LAMPIRAN 52

Daftar Tabel

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi 18
Tabel I.2 Sarana-Prasarana 20
Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2021 dan 2022 21
Tabel I.4 Tindaklanjut Hasil Evaluasi SAkip Tahun 2021 21
Tabel II.1 Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 26
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan 27
Tabel II.3.1 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022 28
Tabel II.3.2 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2022 29
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 30
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 32
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2022 33
Tabel III.3 Pengukuran Capaian Sasaran1 35
Tabel III.4 Target dan Realisasi Kinerja 36
Tabel III.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2022 42

Daftar Gambar

Gambar I.1 Cascading Kinerja Badan Kesatuan dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....12

Gambar I.2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis Badan Kesatuan dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....13

Gambar I.3 Struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....14

Gambar I.4 Tugas,Fungsi dan Peta Jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 15

Gambar I.5 Peta Jabatan.....16

BAB I
Pendahuluan

Bab I berisi:

1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja,Peta Proses Bisnis dan StrukturOrganisasi*
3. *Tugas,Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2019*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepualuan Bangka Belitung.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1 *Cascading* Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Setiap Perangkat Daerah (PD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026. Hubungan antara cascading kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar I.1
Cascading Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

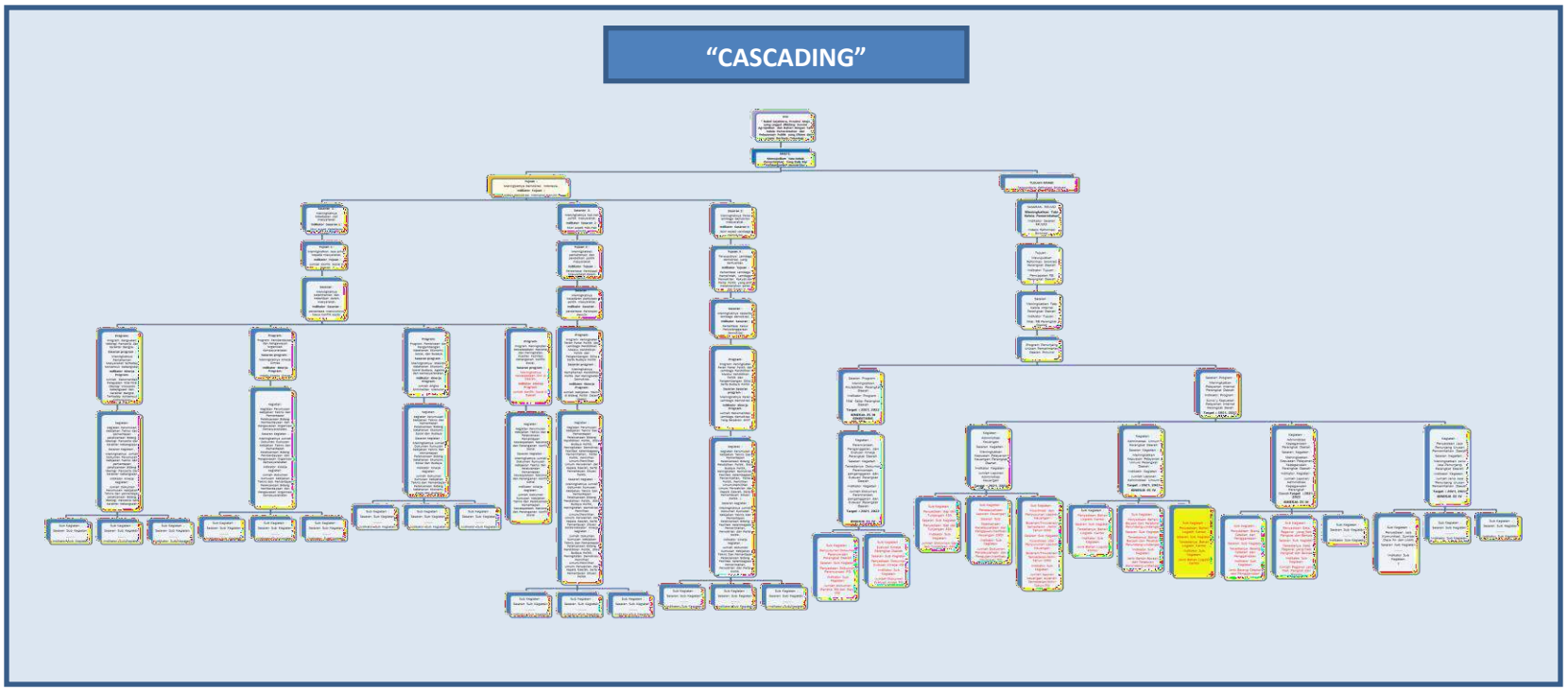

Sumber : https://bit.ly/LakipKesbangpol2022

Gambar I.2
Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

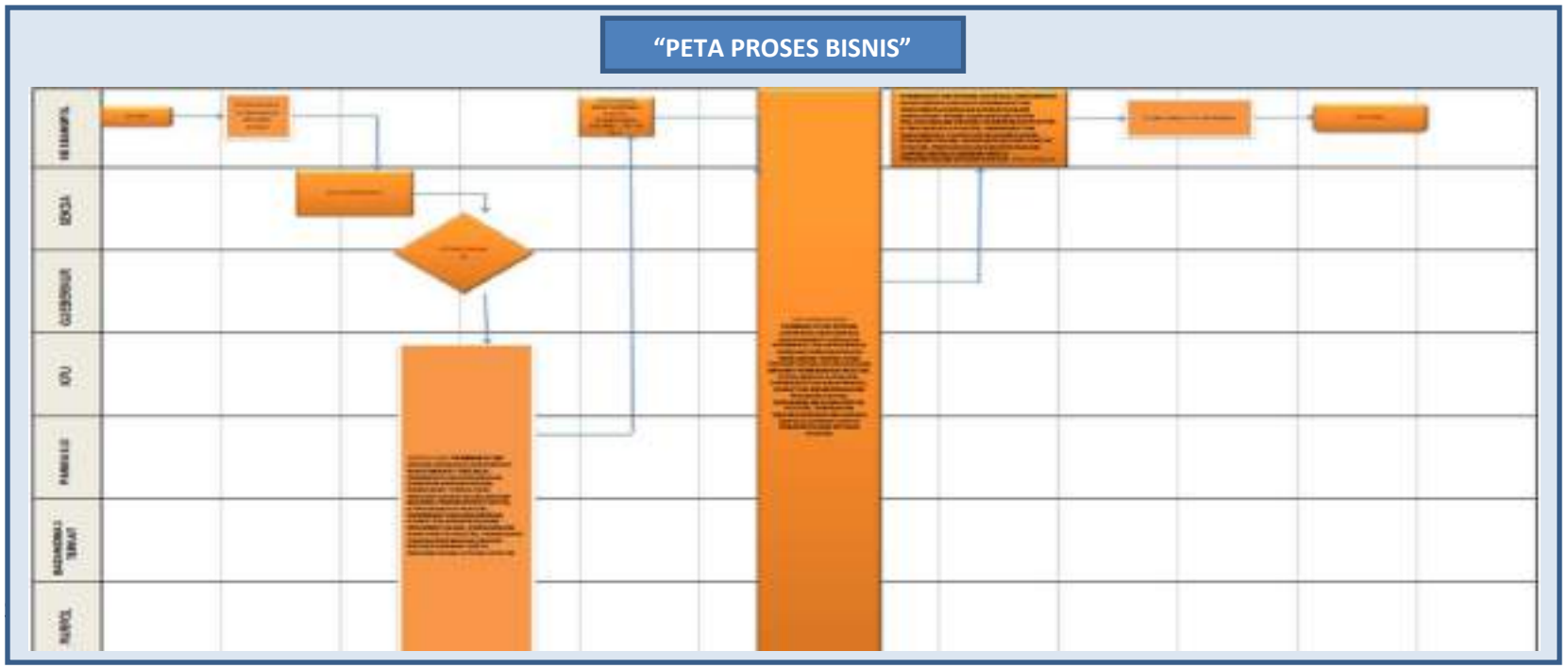

Gambar I.3
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

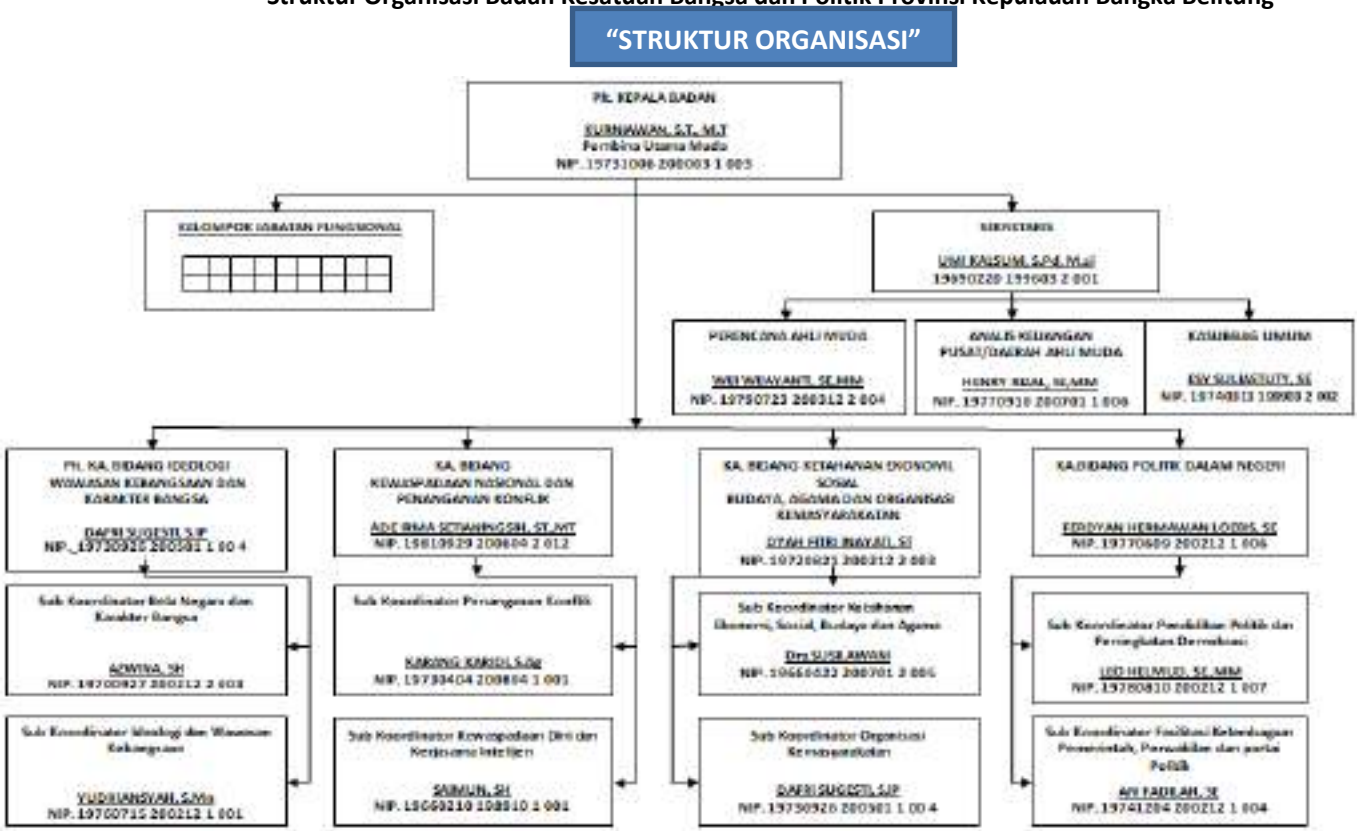

1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambarberikut:

Gambar I.4.
Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan dan Politik. Adapun Badan Kesbangpol Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Wilayah Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. Penyelenggaran Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Penyelenggaraan pembinaan teknis dan penyelenggaraan fungsi urusan pemerintahan Provinsi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Penyelenggaraan koordinasi teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan provinsi;
5. Penyelenggaraan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
6. Penyelenggaraan administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
7. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas fungsinya

Gambar I.5.
Peta Jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

PETA JABATAN

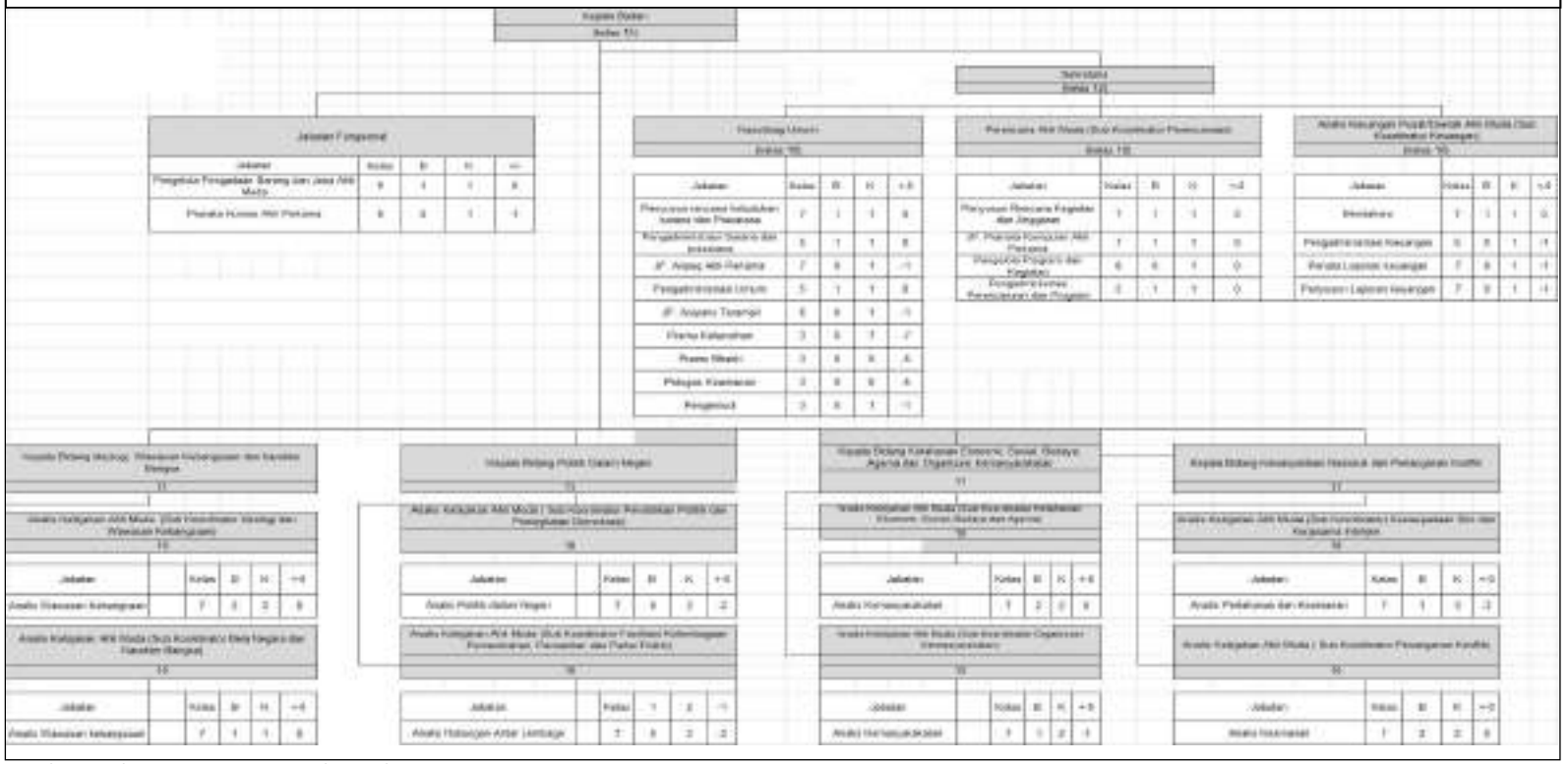

Sumber : Sub Bagian Umum Kesabngpol 2023

1.3 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menangkap dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan "Meningkatkan Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh ", antara lain sebagai berikut:

1. Rendahnya pemahaman dan pengamalan nilai – nilai Pancasila di masyarakat;
2. Kurangnya Pemahaman dan Pendidikan Politik Masyarakat;
3. Belum optimalnya Peran dan Fungsi Lembaga Demokrasi.

1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumberdaya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1

Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN		PEGAWAI YANG ADA		JENISKELAMIN	
		JUMLAH	KUALIFIKASI	JUMLAH	KUALIFIKASI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
A	**JABATAN STRUKUTRAL**	**7**		**7**		**3**	**4**
1	Kepala Badan	1	S1	1	S2	1	
2	Sekretaris Badan	1	S1	1	S2		1
3	Kepala BIdang	4	S1	1	S1(2) –S2(2)	2	2
4	Kepala Sub Bag Umum	1	S1	1	S1		1
B	**JABATAN FUNGSIONAL**	**12**		**12**		**9**	**3**
1	Perencana Ahli Muda	1	S1	1	S2		1
2	Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda	1	S1	1	S2	1	
3	Analis Kebijakan Ahli Muda	8	S1	8	S1 – S2(1)	6	2
4	Pengelola Barang dan Jasa Ahli Muda	1	S1	1	S1	1	
5	Pranata Komputer Ahli Pertama	1	S1	1	S1	1	
C	**JABATAN PELAKSANA**	**22**		**15**		**3**	**12**
1	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	1	S1	1	S1	1	
2	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1	SLTA	1	SLTA		1
3	Pengadministrasi Umum	1	SLTA	1	SLTA		1
4	Penyusun Rencana Program dan Kegiatan	1	S1	1	SLTA		1
5	Pengadministrasi Perencana dan Program	1	SLTA	1	SLTA	1	
6	Bendahara	1	SLTA	1	SLTA	1	
7	Penyusun Laporan Keuangan	1	S1	1	S1		1
8	Pengadministrasi Laporan Keuangan	1	S1	1	S1		1
9	Analis Wawasan Kebangsaan	3	S1	2	S1		2
10	Analis Hubungan Antar Lembaga	2	S1	1	S1		1
11	Analis Kemasyarakatan	4	S1	2	S1		2
12	Analis Pertahanan dan Keamanan	3	S1	2	S1		1
13	Analis Keamanan	2	S1	1	S1		1
D	**PHL**	**18**		**18**		**11**	**7**
1	Pramu Bakti	5		5		2	3
2	Tenaga Kebersihan	7		7		3	4
3	Tenaga Pengamanan	5		5		5	
4	Supir	1		1		1	

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 28 orang (80%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 7 orang (20%), D3 sebanyak 1 orang (2%) ,SLTA sebanyak 3 orang g(8.57%), SLTP sebanyak 0 orang (0%), dan SD sebanyak 0 orang (%). Komposisi pegawai perempuan sama banyak dengan laki-laki yaitu masing – masing berjumlah 26 orang termasuk pegawai harian lepas, begitu juga untuk jabatan struktural, hampir sama banyak hanya lebih satu banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Tabel I.2
Sarana-Prasarana Badan Kesatuan dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset*
1	**TANAH**	**1**	**27.571.086**
	TANAH	1	Rp 27.571.086
2	**PERALATANDANMESIN**	**181**	**Rp. 1.640.006.751**
	ALAT BESAR	1	**Rp. 137.750.000**
	ALAT ANGKUTAN	2	Rp. 245.162.000
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	0	Rp. 13.850.000
	ALAT PERTANIAN	0	0
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	162	Rp. 1.183.499.751
	ALAT STUDIO,KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	15	Rp. 59.745.000
	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	0	0
	ALAT LABORATORIUM	0	0
	ALAT PERSENJATAAN	0	0
	KOMPUTER		0
	ALAT EKSPLORASI	0	0
	ALAT PENGEBORAN	0	0
	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0	0

	ALAT BANTU EKSPLORASI	0	0
	ALAT KESELAMATAN KERJA	0	0
	ALAT PERAGA	0	0
	PERALATANPROSES/PRODUKSI	0	0
	RAMBU–RAMBU	0	0
	PERALATANOLAHRAGA	0	0
3	**GEDUNGDANBANGUNAN**	**1**	**3.143.224.800**
	BANGUNAN GEDUNG	1	Rp.3.143.224.800
	MONUMEN	0	0
	BANGUNAN MENARA	0	0
	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0	0
4	**JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN**	**0**	**0**
	JALAN DAN JEMBATAN	0	0
	BANGUNAN AIR	0	0
	INSTALASI	0	0
	JARINGAN	0	0
5	**ASET TETAP LAINNYA**	**28**	**68.950.625**
	BAHAN PERPUSTAKAAN	28	Rp.68.950.625
	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	0	0
	HEWAN	0	0
	BIOTA PERAIRAN	0	0
	TANAMAN	0	0
	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0	0
	ASET TETAPDALAM RENOVASI	0	0
6	**KOSTRUKSI DALAM PENGERJAAN**	**0**	**0**
	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	0	0
7	**Dll.**		**499.151.167**
	TOTAL		

Kendaraan operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari dua unit yakni satu unit kendaraandinas jabatan, dua unit kendaraan operasional, dua unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang mushola, ruang gudang, ruang tunggu, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia

dalam kondisi baik dan perlu peningkatan. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 2 Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana cukup memadai. Sebanyak 90% dari komputer/laptop yang ada diproduksi Tahun 2000an awal yang spesifikasinya sudah jauh tertinggal dengan kondisi saat ini sehingga tidak/mendukung tuntutan pekerjaan yang 90% berbasis IT.

Tabel I.3
Perbandingan Anggaran Tahun 2022 dan 2023

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah
2022	14.600.188.805	2.233.472	14.602.422.277
2023	53.761.911.185	936.285.900	54.698.277.285

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2022 dibanding tahun 2023 terdapat kenaikan anggaran belanja operasi sebesar Rp. 40.095.855.088 .

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Tabel 1.4
Tindaklanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

No	Saran/Rekomendasi	Tindaklanjut
1.	Surat Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No: 700/173/LHE/ITDA2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022. Rekomendasi: 1. Untuk membuat pedoman Evaluasi Akuntabilitas Internal sesuai Standar; 2. Dalam pelaporan Kinerja untuk lebih menginformasikan kinerja secara rinci disertakan dokumen pendukung juga untuk mencapai kualitas dalam hal perbaikan/penyempurnaan serta kebijakan mencapai kinerja berikutnya; 3. Untuk melihat keefektifan dalam evaluasi akuntabilitas kinerjainternal yang memadai serta memberikan kesan nyata dalam kinerja.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pencapaian target kinerja (output dan outcome)Tahun 2023 dengan langkah-langkah: 1. Membuat Pedoman Evaluasi Akuntabiitas Internal sesuai dengan standar; 2. Dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesbangpol akan leih menginformasikan kinerja secara rinci disertakan dokumen pendukung agar dapat mencapai kualitas dalam hal perbaikan/penyempurnaan serta kebijakan mencapai kinerja berikutnya; 3. Badan Kesbangpol akan melihat keefektifasan dalam penyusunan Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang memadai serta memberikan kesan nyata kinerja.

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab2 Berisi:

1. *Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD*
2. *Strategi dan Arah Kebijakan*
3. *Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023*
4. *Perjanjian Kinerja Tahun 2023*
5. *Instrumen Pendukung Capaian Kinerja PD*

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Daerah 2023 - 2026Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2023-2026. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah Meningkatnya Demokrasi Indonesia, Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsadan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lima tahun adalah:

1. Meningkatkan rasa aman kepada masyarakat;
2. Meningkatkan pemahaman dan pendidikan politik masyarakat;
3. Terwujudnya Lembaga demokrasi yang berkualitas.
4. Terwujudnya Reformasi Birokrasi.

Adapun sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam waktu empat tahun sebagai berikut:

Tabel II.1
Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2023-2026

NO.	SASARANSTRATEGIS	INDIKATORKINERJA	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUNAN				Target Akhir Renstra
					2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1.	Penguatan Kehidupan yang berdemokratis berdasarkan Pancasila	persentase peristiwa konflik Sosial menurun setiap tahunnya.	Persen	0	75%	50%	25%	25%	257%
2.	Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah	nilai	0	66%	68%	72%	72%	72%

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah,diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2
Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAHKEBIJAKAN
1.	Penguatan Kehidupan yang berdemokratis berdasarkan Pancasila	Memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan kebhinekatunggalikaan dalam kehidupan bermasyarakat	Peningkatan pembinaan pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan.
			Memperkuat kewaspadaan dan deteksi dini di masyarakat
			Peningkatan Ketahanan Sosial budaya pada masyarakat
			Meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat terhadap bahaya napza.
			Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi.
			Peningkatan fungsi parpol dan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik.

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3.1.
Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah /Berkurang
1.Penguatan Kehidupan yang Berdemokratis berdasarkan Pancasila	**1.1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**3.333.999.768**	**4.483.988.918**	**1.149.999.150**
	1.1.1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Idelogi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.333.999.768	4.483.988.918	1.149.999.150
	1.2 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	**160.947.100**	**175.946.900**	**14.999.800**
	1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	160.947.100	175.946.900	14.999.800
	1.3 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	**701.999.500**	**880.520.025**	**178.520.525**
	1.3.1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	701.999.500	880.520.025	178.520.525
	1.4 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	**853.388.100**	**1.994.485.378**	**1.141.097.278**
	1.4.1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	3.980.388.100	1.994.485.378	1.141.097.278
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	**3.980.814.300**	**39.907.398.573**	**35.926.584.273**
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan ,Perwakilandan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	3.980.814.300	39.862.722.493	35.926.584.273
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		**9.031.148.768**	**47.442.339.794**	**38.411.19 1.026**

Tabel II.3.2

Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	**8.949.128.744**	**8.865.964.043**	**(83.164.701)**
1.	1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	246.167.400	296.167.300	49.999.900
2.	1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.899.009.124	5.581.058.523	(317.950.601)
3.	1.3 Kegiatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	68.500.000	68.500.000	0
4.	1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	105.297.680	105.297.680	0
5.	1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	464.019.200	645.885.200	181.866.000
6.	1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	936.285.900	936.285.900	0
7.	1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	823.947.440	823.947.440	0
8.	1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	405.902.000	408.822.000	2.920.000
	Total Anggaran Pendukung	**8.949.128.744**	**8.865.964.043**	**(83.164.701)**

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

Tabel II. 4
Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung tahun 2023

No.	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan				Target
					I	II	III	IV	
1.	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah	nilai	80	20	20	20	20	80
2.	Penguatan Kehidupan yang berdemokratis berdasarkan Pancasila	Persentase menurunnya kasus konflik sosial	Persen	37,7	9,42	9,42	9,42	9,42	37

Pada tahun 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Reviu dilakukan karena adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel II.5
Reviu Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan				Target
					I	II	III	IV	
1.	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah	Nilai	66	16,5	16,5	16,5	16,5	66
2.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban dalam Masyarakat	Persentase Menurunnya Kasus Konflik Sosial	persen	75	18,75	18,75	18,75	18,75	75

Keterangan Tambahan:

1. Indikator Kinerja dan target kinerja tidak berubah, tetapi anggaran bertambah 124,88% atau sebesar Rp. 21.284.034.713,- yang digunakan untuk membiayai kegiatan
   - KPU Rp. Rp. 27.394.971.973,-;
   - Bawaslu Rp. 8.323.028.000,-;
   - Kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Rp. 1.000.000.000,-;
   - Hibah Ormas Pemuda Pancasila Rp. 300.000.000,-.
   - 1.310.026.352
2. Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV.

BAB 3
Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2023*
2. *Realisasi Anggaran*
3. *Inovasi*
4. *Lintas Sektor*

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	KRITERIA Kode
1.	91≤100	Sangat Baik	HijauTua
2.	76≤90	Tinggi	HijauMuda
3.	66≤75	Sedang	KuningTua
4.	51≤65	Rendah	KuningMuda
5.	≤50	Sangat Rendah	Merah

❖ *Sumber:Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Tabel III. 2
Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2017	CAPAIAN 023	TAHUN 2023				TARGET AKHIR RENSTRA
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA /KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Penguatan Kehidupan yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila	Indikator: Persentase Menurunnya Kasus Konflik Sosial Jumlah kasus pada tahun tersebut dibagi jumlah kasus dikalikan 100	Persen		10,25	75	74,29	100	Sangat Baik	25
4.	Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai RB perangkat Daerah.	nilai		92	66	-	-	-	80

3.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023

Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Sasaran : Penguatan Kehidupan yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila

Kinerja sasaran " Penguatan Kehidupan yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila" diukur dengan indikator " Menurunnya Jumlah Kasus Konflik Sosial". Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Kasus Pada Tahun Tersebut N}}{\text{Jumlah Kasus}} \text{ X 100\%}$$

Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah

Kinerja sasaran " Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah " diukur dengan indikator " Nilai RB Perangkat Daerah ". Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

NILAI RB

Tabel III.3
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Penguatan Kehidupan Berdemokratis Berdasarkan Pancasila	Persentase Menurunnya Kasus Konflik	Jumlah Kasus Pada Tahun Tersebut / Jumlah Kasus X 100%
2.	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah	**NILAI RB**

Kinerja sasaran " Penguatan Kehidupan Berdemokratis Berdasarkan Pancasila " diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan menurunnya " Jumlah Kasus pada tahun tersebut dibagi Jumlah kasus tahun awal dikali seratus persen ". Tahun 2023 capaian kinerja sasaran ini adalah 74,29% dari target 75%. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III. 4.
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d2021 terhadap target 2022(%)
		Target	Realisasi	Capaian %		
2	3	4	5	6	7	8
Penguatan Kehidupan Berdemokratis Berdasarkan Pancasila	-	757%	74,29%	100	257%	100
Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	92	66	-	-	-	-

Analisis Ketercapaian Sasaran " Penguatan Kehidupan Berdemokratis Berdasarkan Pancasila" adalah sebagai berikut:

a. Tercapai 74,29 dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 75% tercukupi;
b. Tidak dapat dibandingkan dengan tahun lalu karena indikator dan target berbeda karena perubahan dokumen perencanaan;
c. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, sasaran berhasil tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

1. Program Penguatan Idelogi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yaitu dengan sasaran program " Persentase Jumlah Konflik yang Berlatarbelakang Ideologi " dengan Indikator Jumlah Kasus Penistaan terhadap Simbol-Simbol Negara dengan Target pada tahun 2023 menurun 75 % Formula perhitungan indikator ini adalah:

$$\frac{\textbf{Persentase Kasus Tahun N}}{\textbf{Persentase Kasus Tahun N-1}} \textbf{ X 100\%}$$

Pada tahun 2023 diselenggarakan capaian kinerja untuk indikator ini adalah (0/0)x100%= 0% untuk persentase jumlah kasus, dan dari target 100% - 0% =100% atau sebesar 100%. Capaian ini didukung oleh: Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Idelogi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

2. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan sasaran program adalah " Indeks Kinerja Ormas ", Indikator dari program ini yaitu Nilai Indeks Ormas dengan target Tahun 2023 adalah 50, Formula perhitungan indikator ini adalah:

Indeks Kinerja Ormas

Pada tahun 2023 diselenggarakan capaian kinerja untuk indikator ini adalah nilai indeks kinerja ormas senilai 50

2 dokumen yang dihasilkan pada tahun 2023 dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar dua dokuemen makan diperolah hitungan 2/2 x100%= 100%, jadi diperoleh hasil kinerja sebesar 100%.

Capaian ini didukung oleh: Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

3. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya yaitu dengan sasaran program "Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya " Indikator dari program ini adalah Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan target 3 Dokumen. Formula perhitungan indikator ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan Tahun N}}{}$$

Pada tahun 2023 diselenggarakan capaian kinerja untuk indikator ini adalah tiga dokumen dengan target tiga dokumen maka diperoleh perhitungan 3 dokumen dibagi 3 dokumen target dikalikan 100% maka diperoleh hasil kinerja sebesar 100%.

Capaian ini didukung oleh: Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Idelogi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

4. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan

Politik “, Indikator dari program ini adalah Jumlah Persentase Pembinaan Politik di Daerah dengan target 30 persen. Formula perhitungan indikator ini adalah:

$$\frac{\textbf{Jumlah Pembinaan Politik di Daerah Tahun Berjalan}}{\textbf{Jumlah Pembinaan Politik di Daaerah Tahun N}} \textbf{ X 100\%}$$

N= (69 SMA/SMK, 11 Parpol, 1 KPU, 1 Bawaslu, 1 Pemerintah= 83)

Pada tahun 2023 diselenggarakan capaian kinerja untuk indikator ini adalah 30 persen Pembinaan Politik di daerah dengan target 30 persen maka diperoleh perhitungan 30 Pembinaan dibagi 30 Pembinaan target dikalikan 100% maka diperoleh hasil kinerja sebesar 100%.

Capaian ini didukung oleh: Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Idelogi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

5. Program Peningkatan Kewasapadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, yaitu dengan sasaran program “ Persentase Daerah Terlibat Konflik Sosial “ , Indikator dari program ini yaitu Jumlah Konflik Sosial di Daerah, dengan target 35 Kasus.

   Formula perhitungan indikator ini adalah:

$$\frac{\textbf{Jumlah Daerah Terlibat Konflik Sosial Tahun Berjalan}}{\textbf{Jumlah daerah Terlibat Konflik Sosial Tahun N}} \textbf{ X 100\%}$$

   N= 35 Kasus

   Pada tahun 2023 diselenggarakan capaian kinerja untuk indikator ini adalah Jumlah kasus yang dapat ditangani tahun ini yaitu sebnayak 26 kasus dengan jumlah kasus targetsebesar tiga puluh lima kasus maka diperoleh perhitungan dua puluh enam dikali tiga puluh lima dikali 100%, maka diperoleh hasil 100%.

   Capaian ini didukung oleh: Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Tabel III.5
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Penguatan Kehidupan yang Berdemokratis berdasarkan Pancasila. Persentase menurunnya Kasus Konflik (jumlah Kasus pada tahun tersebut dibagi Jumlah Kasus dikali 100%) - 100% = (26/35)x100%= 74,29%	75%	74,29%	100%

DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		Tim terpadu Organisasi Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023
2.		Kegiatan Rapat Tim Terpadu Organisasi Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
3.		Kegiatan Test Urine Kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
4.		Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan peredaran danprekusor Narkotika di kalangan ASN Provinsi Kep. Babel Tahun 2023

5.		Pemberian Penghargaan pada Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan peredaran danprekusor Narkotika di kalangan ASN Pro Kep. Babel Tahun 2023
6.		Kegiatan Dialog Interaktif Kegiatan Pembauran Kebangsaan
7.		Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan kepada kalangan Pelajar pada Program Penguatan Idelogi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
8.		Pembentukan kader Pemimpin yang berkarakter Pancasila melalui Kegiatan Paskibraka

9.		Upacara Memperingati Hari UlangTahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 78 di Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
10.		Kegiatan Pawai Baris Berbaris dan Karnaval dalam Rangka Memperingati Hari Ulang Tahun RI ke 78 di Pangkalpinang
11.		Gerakan Nasional Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
12.		Pemberian Santunan Kepada Veterandan Janda veteran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

13		Pengibaran Bendera Raksasa pada Peringatan Hari Pancasila 01 Juni2024 di Jembatan Emas, Aer Anyer, Kabupaten Bangka
14		Kegiatan Penandatangan Nota Pencairan Hibah Daerah kepada KPU dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitungpada Tanggal 06 November 2023 untuk Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024
15.		Pembacaan Ikrar dan Penandatangan Netralitas ASN dalam Pemilu Tahun 2024
16.		Dialog Kebangsaan Kegiatan Fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah

17.		Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Forkopimda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023
18.		Kegiatan Tim Awas Babel
19		Kegiatan Fasilitasi Forkopimda dalam Program Gule Gabung Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
20.		Kegiatan Sosialisasi Bagi Pemilih Pemula dalam Rangka Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024

Faktor Pendukung keberhasilan

a. Dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampu mengakomodir setiap program kegiatan yang dilaksanakan;
b. Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik;
c. Dukungan anggaran baik melalui APBD maupun APBN;

Faktor Penghambat keberhasilan

a. Beberapa program kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena adanya recoufusing anggaran;
b. Kurangnya Tenaga Sumber Daya Manusia ;
c. Keterbatasan sarana dan prasarana.

Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.6
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi per Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Realisasi	Target(Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat	Persentase Menurunnya Kasus Konflik	34,7%	87,18%	100%	3,265,360,000	2.527.555.487	77,41	737,804,513
Jumlah						**7.176.995.370**	**6.437.288.427**	**89,69**	**739.706.943**
2	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah	80	92	100%	7.425.426.907	7.097.037.635	95.58	4.42
Total Belanja Operasi						**14.602.422.27**	**13.534.326.062**	**92,68**	**7.32%**

Sumber: *http:SIPD*, *Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bengka Belitung Th 2023, Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bengka Belitung 2023*

Berdasarkan tabel III.6 , capaian kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai target kinerja tahun 2023 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja langsung program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp. 7.176.995.370, terealisasi Rp. 6.437.288.427 atau 89.69% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp. 739.706.943 atau sekitar 10,31% yang bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber
- Efisiensi sewa tempat
- Efisiensi biaya makanan dan minuman

Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi menjadi alternatif untuk tetap dapat mencapai tujuan dengan keterbatasan. Berbagai inovasi menghiasi Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tak terkecuali juga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keterbatasan Sumber Daya Manuasia dan Sarana dan Prasarana serta anggaran dapat disiati dengan menggunakan inovasi untuk mendukung tercapainya tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja di BadanKesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, antara lain:

a. Aplikasi WhatsAap Group Kinerja, untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi dalam bekerja seperti memberikan pengumuman, meneruskan perintah atasan, memberikan berita yang terkait dengan pekerjaan, dan sebagainya;
b. Aplikasi Awas Babel , adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menampung pengaduan masayarakat Babel terkait situasi dan keadaan keamanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
c. Dll.

Bab 4 Berisi:

1. *Kesimpulan*
2. *Rekomendasi Peningkatan kinerja*

BAB 4
Penutup

Hasil laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Permasalahan yang dihadapi saat ini dalam rangka mencapai indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

1. Data dukung yang kurang memadai;
2. Kurangnya jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia ;
3. Kurangnya koordinasi dengan pemerintahan pusat, Badan Kesbangpol kabupaten/ kota.

Faktor kunci keberhasilan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 adalah:

1. Pimpinan yang mempunyai integritas yang tinggi untuk menjalankan organisasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan dengan memberikan komando dan arahan yang jelaskepada bawahan ;
2. Komitmen yang kuat seluruh pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mewujudkan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Koordinasi dan komunikasi internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berjalan dengan baik, dilksanakan sangat intens baik melalui rapat rutin setiap bulan maupun secara berkala dan dilakukan dan dikemas secara kekeluargaan;.
4. Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Lebih Intens melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum di Kementerian dalam Negeri, terkait arah dan kebijakan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di pusat untuk dilaksanakan di daerah;
2. Berusaha membangun sikronisasi dan sinergi dengan organisasi perangkat Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten/kota dalam rangka mendukung pencapaian tujuan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kepulauan Bangka Belitung;

3. Menjalin hubungan yang harmonis dengan Stakholder Kesbangpol yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kordinasi Pencegahan Teroris (FKPT) dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mendukung pencapaian tujuan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kepulauan Bangka Belitung;
4. Memaksimalkan kinerja tim kerja pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinisi Kepulauan Bangka Belitung seperti Tim Terpadu Pemberantasanan Narkotika, Tim Terpadu Pencegahan Dini Konflik dalam menjalankan kinerja di Kesbangpol untuk mencapai tujuan organisasi;
5. Memperkuat basis data sektoral sebagai pendukung pengambilan langkah – langkah kebijakan dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Meningkatkan kompetensi dan skill Sumber Daya Manusia di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
7. Menambah dan meningkatkan sarana dan prasarana guna pendukung menunjang kinerja lebih maksimal.

L A M PI R A N

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Rencana Pembangunan Daerah Empat Tahun)

Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2023-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target CapaianTahun			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah	66	68	70	72
2.	Meningkatkan Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	Penguatan Kehidupan yang Berdemokrasi Berdasarkan Pancasila	Persentase Menurunnya Kasus Konflik Sosial	75%	50 %	25 %	25 %

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparansi dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	**KURNIAWAN, S.T., M.T.**
Jabatan	:	Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama	:	**Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si.**
Jabatan	:	Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, November 2023

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si.

PIHAK PERTAMA,
Plt. KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

KURNIAWAN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19731006 200003 1 002

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Formula Penghitungan Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penguatan Kehidupan yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila	Persentase Peristiwa Konflik Sosial Menurun Setiap Tahunnya	75 %	$\frac{\text{Jumlah Kasus Pada Tahun ini}}{\text{Jumlah Kasus Tahun Lalu}} \times 100\%$
2.	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah	66	Nilai RB

Anggaran :

NO	Indikator Kinerja (Kolom 3)	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Persentase Peristiwa Konflik Sosial Menurun Setiap Tahunnya	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 4.483.988.918	APBD
		Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 39.907.398.573	APBD
		Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 175.946.900	APBD
		Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 880.520.025	APBD

		Peningkatan Kewaspadaan Nasional, dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 1.994.485.378	APBD
2.	Nilai RB Perangkat Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 8.865.961.043	APBD

Pangkalpinang, November 2023

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si.

PIHAK PERTAMA,
Plt. KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

KURNIAWAN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19731006 200003 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : UMI KALSUM, S.Pd., M.Si.
Jabatan : Sekretaris Badan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : KURNIAWAN, S.T., M.T.
Jabatan : Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, 22 November 2023

PIHAK KEDUA,
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

KURNIAWAN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730006 200003 1 002

PIHAK PERTAMA,
Sekretaris Badan,

UMI KALSUM, S.Pd., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690220 199603 2 001

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Formula Penghitungan Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79	Skor SAKIP Bakesbangpol Hasil Evaluasi Inspektorat
		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	66	Nilai RB

Anggaran...

NO	IndikatorKinerja (Kolom 3)	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 296.167.300	APBD
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 296.167.300	APBD
2.	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 8.502.796.743	APBD
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 5.581.058.523	APBD
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Rp. 65.300.000	APBD

		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 105. 257.680	APBD
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 645.885.200	APBD
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 936. 285.900	APBD
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 823. 947.440	APBD
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 408.822.000	APBD

Pangkalpinang, 22 November 2023

PIHAK KEDUA,
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

KURNIAWAN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19731006 200003 1 002

PIHAK PERTAMA,
Sekretaris Badan,

UMI WALSUM, S.Pd., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690220 199603 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	FERDIYAN HERMAWAN LOEBIS, S.E., M.M.
Jabatan	:	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama	:	KURNIAWAN, S.T., M.T.
Jabatan	:	Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, 22 November 2023

PIHAK KEDUA,
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

KURNIAWAN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19731006 200003 1 002

PIHAK PERTAMA,
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri,

FERDIYAN HERMAWAN LOEBIS, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19770609 200212 1 006

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Formula Penghitungan Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penguatan Kehidupan yang Demokratis Berdasarkan Pancasila	Persentase Pembinaan Politik di Daerah	30 %	Jumlah Pembinaan Politik di Daerah Tahun Berjalan / Jumlah Pembinaan Politik di Daerah Tahun n-1 x 100%

Anggaran :

NO	Indikator Kinerja (Kolom 3)	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Persentase Pembinaan Politik di Daerah	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 39.907.398.573	APBD
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Penentapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Rp. 39.907.398.573	APBD

Pangkalpinang, 22 November 2023

PIHAK KEDUA,
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

KURNIAWAN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19731006.200003 1 002

PIHAK PERTAMA,
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri,

FERDIYAN HERMAWAN LOEBIS, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19770809.200212 1 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	DYAH FITRI INAYATI, S.T.
Jabatan	:	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama	:	KURNIAWAN, S.T., M.T.
Jabatan	:	Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, 23 November 2023

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan,
KURNIAWAN, S.T., M.T.	DYAH FITRI INAYATI, S.T.
Pembina Utama Muda	Pembina Tingkat I
NIP. 19731006 200003 1 002	NIP. 19720821 200212 2 003

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Formula Penghitungan Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penguatan Kehidupan yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila	Indeks Kinerja Ormas	50	Indeks Kinerja Ormas
		Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Daerah	30%	Jumlah Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya tahun Berjalan / Jumlah yang akan Dibina X 100%

Anggaran :

NO	Indikator Kinerja (Kolom 3)	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Indeks Kinerja Ormas	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 175.946.900	APBD
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 175.946.900	APBD
2.	Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Daerah	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 880.520.025	APBD
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 880.520.025	APBD

Pangkalpinang, 22 November 2023

PIHAK KEDUA,
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

KURNIAWAN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19731006 200003 1 002

PIHAK PERTAMA,
Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya,
Agama dan Organisasi Kemasyarakatan,

DYAH FITRI INAYATI, S.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19720821 200212 2 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	FERDIYAN HERMAWAN LOEBIS, S.E., M.M.
Jabatan	:	Plt. Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama	:	KURNIAWAN, S.T., M.T.
Jabatan	:	Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, 22 November 2023

PIHAK KEDUA,
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

KURNIAWAN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19731006 200003 1 002

PIHAK PERTAMA,
Plt. Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

FERDIYAN HERMAWAN LOEBIS, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19770609 200212 1 006

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Formula Penghitungan Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penguatan Kehidupan yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila	Persentase Jumlah Konflik yang Berlatarbelakang Ideologi	75 %	Jumlah Konflik yang Berlatarbelakang Ideologi tahun n / Jumlah Konflik yang Berlatarbelakang Ideologi Tahun n-1 X 100%

Anggaran :

NO	Indikator Kinerja (Kolom 3)	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Persentase Jumlah Konflik yang Berlatar belakang Ideologi	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 4.483.968.918	APBD
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 4.483.968.918	APBD

Pangkalpinang, 22 November 2023

PIHAK KEDUA,
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

KURNIAWAN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19731006 200003 1 002

PIHAK PERTAMA,
Plt. Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan
Kebangsaan dan Karakter Bangsa

FERDIYAN HERMAWAN SOEBIS, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19770609 200212 1 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	ADE IRMA SETIANINGSIH, S.T., M.T.
Jabatan	:	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama	:	KURNIAWAN, S.T., M.T.
Jabatan	:	Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, 22 November 2023

PIHAK KEDUA,
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

KURNIAWAN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730306 200003 1 002

PIHAK PERTAMA,
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri,

ADE IRMA SETIANINGSIH, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 19810929 200604 2 012

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Formula Penghitungan Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penguatan Kehidupan yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila	Persentase Daerah Terlibat Konflik Sosial	75 %	Jumlah Daerah Terlibat Konflik Sosial Tahun Berjalan / Jumlah Daerah Terlibat Konflik Sosial Tahun n-1 X 100%

Anggaran :

NO	Indikator Kinerja (Kolom 3)	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Persentase Daerah Terlibat Konflik Sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 1.994.485.378	APBD
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp. 1.994.485.378	APBD

Pangkalpinang, 30 November 2023

PIHAK KEDUA,
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

KURNIAWAN, S.T.,M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19731006 200003 1 002

PIHAK PERTAMA,
Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional,

ADE IRMA SETIANINGSIH, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 19820929 200604 2 012

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	UMI KALSUM, S.Pd., M.Si.
Jabatan	:	Sekretaris Badan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama	:	KURNIAWAN, S.T., M.T.
Jabatan	:	Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, 22 November 2023

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris Badan,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,	
KURNIAWAN, S.T., M.T.	UMI KALSUM, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Muda	Pembina Tingkat I
NIP. 19710004 200003 1 002	NIP. 19690220 199603 2 001

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Formula Penghitungan Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	79	Skor SAKIP Bakesbangpol Hasil Evaluasi Inspektorat
		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	66	Nilai RB

Anggaran :

NO	IndikatorKinerja (Kolom 3)	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 296.167.300	APBD
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 296.167.300	APBD
2.	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 8.559.796.743	APBD
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 5.581.058.523	APBD
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Rp. 68.500.000	APBD

		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 105. 297.680	APBD
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 645.885.200	APBD
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 936. 285.900	APBD
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 823. 947.440	APBD
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 408.822.000	APBD

Pangkalpinang, 22 November 2023

PIHAK KEDUA,
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

KURNIAWAN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19731006 200003 1 002

PIHAK PERTAMA,
Sekretaris Badan,

UMI KALSUM, S.Pd., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690220 199403 2 001

Lampiran 3. Evaluasi LKjIP Tahun 2022

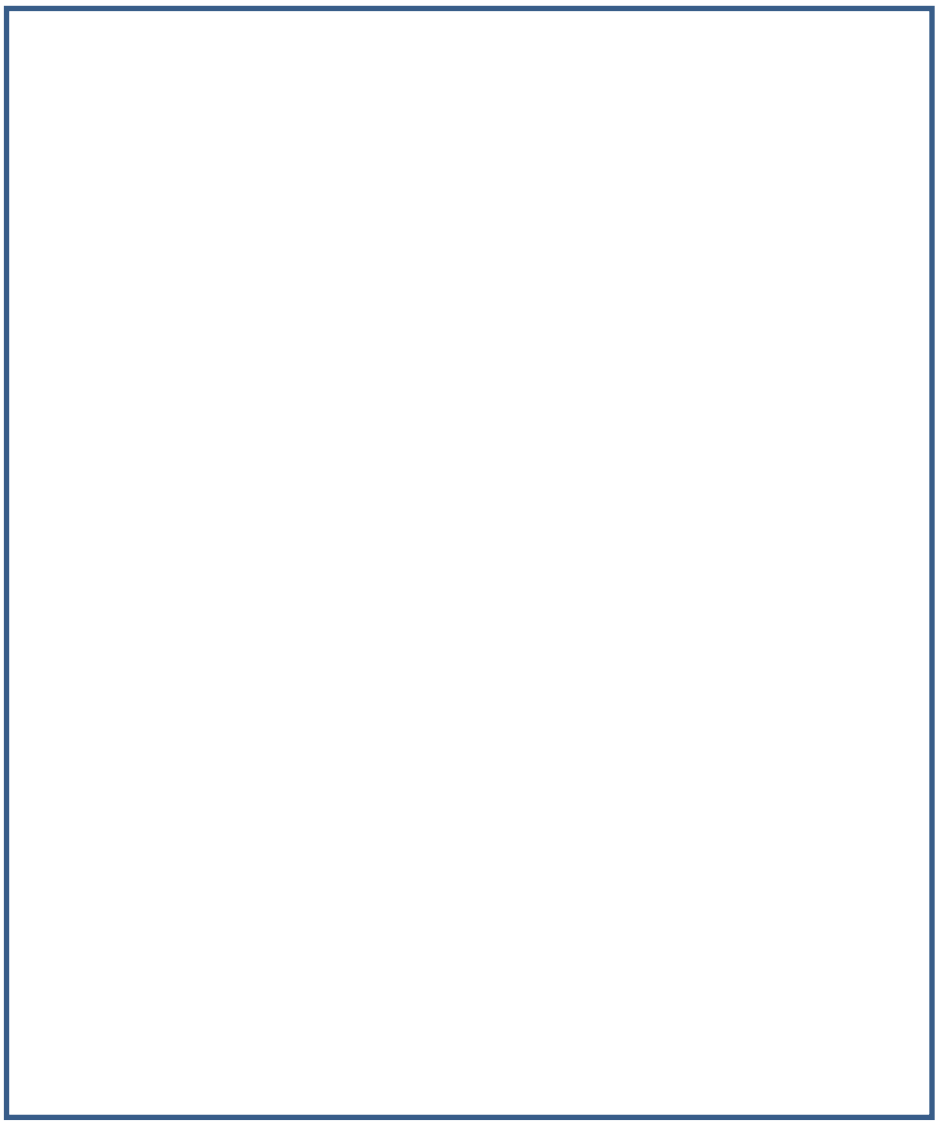

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

INSPEKTORAT DAERAH

KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
JLN. RAJA BELITUNG NO. 2 DESA/KEL. AIR ITAM KAB/KOTA PANGKALPINANG TELP. (0717) 438181 FAX. (0717) 434433

Pangkalpinang, 18 April 2022

Nomor : 700/113 /LHE/INPTD/2022
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
di -
PANGKALPINANG

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melaksanakan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021, dengan tujuan:
   a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
   b. Menilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
   c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas Perangkat Daerah;
   d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya.

3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperoleh nilai sebesar **70,48** dengan kategori **BB (Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal)**. Rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2020	Nilai 2021
a.	Perencanaan Kinerja	30	27,05	24,14
b.	Pengukuran Kinerja	25	18,13	18,13
c.	Pelaporan Kinerja	15	11,05	11,14
d.	Evaluasi internal	10	5,78	6,66
e.	Capaian Kinerja	20	15,56	10,42
Nilai Hasil Evaluasi		100	77,60	70,48
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB

4. Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan rincian sebagai berikut:

   a. Perencanaan Kinerja

   Perencanaan kinerja yang perlu diperhatikan yaitu:
   1) Renstra tidak dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (Indikator Kinerja Tujuan) dan tidak disertai target keberhasilan;
   2) Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran tidak didukung oleh anggaran yang memadai dikarenakan adanya Refocusing Anggaran sehingga terdapat target kinerja yang tidak terealisasi.

   b. Pengukuran Kinerja

   Pengukuran kinerja yang perlu diperhatikan yaitu:
   1) Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya namun belum ada tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan;
   2) Hasil pengukuran kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*;
   3) Hasil pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum optimal digunakan dalam pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala;
   4) Hasil pengukuruan kinerja atas Rencana aksi belum sepenuhnya digunakan untuk pengendalian dan Pemantauan kinerja secara berkala; dan
   5) Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi.

   c. Pelaporan Kinerja

   Pelaporan kinerja yang perlu diperhatikan yaitu:
   1) Laporan kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
   2) Terdapat kesalahan dalam melakukan penghitungan capain kinerja sehingga informasi yang disajikan tidak dapat diandalkan;
   3) Informasi yang disajikan belum digunakan dalam perbaikan perencanaan;

4) Informasi yang disajikan belum digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi;
5) Informasi yang disajikan belum digunakan untuk peningkatan kinerja; dan
6) Informasi yang disajikan belum digunakan untuk penilaian kinerja.

d. Evaluasi Internal

Evaluasi internal yang perlu diperhatikan yaitu:
1) Pemantauan Rencana Aksi belum dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja dan belum memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan; dan
2) Hasil evaluasi program dan rencana aksi belum ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program dalam bentuk langkah-langkah nyata di masa yang akan datang.

e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Pencapaian sasaran/kinerja organisasi yang perlu mendapat perhatian yaitu masih terdapat indikator kinerja dengan capaian rendah dan terdapat target kinerja yang tidak terealisasi dikarenakan adanya *Refocusing* Anggaran dalam rangka penanggulangan pandemi *covid-19*.

f. Rekomendasi Evaluasi Tahun Lalu yang belum ditindaklanjuti.

Terdapat rekomendasi evaluasi tahun sebelumnya yang perlu ditindaklanjuti, yaitu:
1) Penggunaan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja;
2) Perlu adanya Pemantauan Program dan Rencana aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja dan memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan;
3) Hasil evaluasi program dan Rencana Aksi agar ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program dalam bentuk langkah-langkah nyata di masa yang akan datang;
4) Meningkatkan kinerja agar tercapai keluaran dan hasil yang ditargetkan.

5. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:
   a. Revisi Restra dengan menetapkan indikator tujuan dan targetnya;
   b. Penggunaan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja;
   c. Mengoptimalkan pelaksanaan pemantauan Program dan Rencana aksi dalam rangka mengendalikan kinerja dan memberikan alternatif perbaikan;
   d. Menindaklanjuti hasil evaluasi program dan rencana aksi secara berkala dalam bentuk langkah-langkah yang nyata dan perbaikan di masa yang akan datang;

e. Menyajikan laporan kinerja yang dapat diandalkan dengan meminimalisir kesalahan-kesalahan analisis dalam laporan kinerja;
f. Menyajikan laporan kinerja yang memberikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
g. Meningkatkan kinerja agar tercapai keluaran dan hasil yang ditargetkan.

Demikian laporan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SUBANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 196306121985031001

Tembusan:
- Menteri PAN dan RB;
- Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJIP Tahun 2022

RENCANA AKSI (ACTION PLAIN)
TINDAKLANJUT REKOMENDASI INSPEKTORAT DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (AKIP) TAHUN 2022
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Ket
1	2	3	4	5	6
1.	Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 700/173/LHE/ITDA/2023 Tanggal 28 April 2023 Tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 menunjukan nilai sebesar 68,21 dengan predikat B, hal ini menunjukkan implementasi akuntabilitas kinerja Badan kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung "Baik"	1. Untuk membuat Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Internal sesuai dengan standar	Badan Kesbangpol akan membuat Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Internal sesuai dengan standar	Triwulan IV Tahun 2023	
		2. Dalam Pelaporan Kinerja untuk lebih menginformasikan kinerja secara rinci disertakan dokumen pendukung juga untuk dapat mencapai kualitas dalam hal perbaikan/penyempurnaan serta kebijakan mencapai kinerja berikutnya	Dalam Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesabangpol akan lebih meninformasikan kinerja secara rinci disertakan dokumen pendukung agar dapat mencapai kualitas dalam hal perbaikan/penyempurnaan serta kebijakan mencapai kinerja berikutnya	Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2023	
		3. Untuk melihat keefektifasan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memadai serta memberikan kesannyata dalam kinerja	Badan Kesbangpol akan melihat kefektifasan dalam penyusunan Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang memadai serta memberikan kesan nyata dalam kinerja	Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2023	

Pangkalpinang, Agustus 2023
Plt. Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung

UMI KALSUM, S.Pd., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690220 199603 2 001

Dipindai dengan CamScanner